



Analisis Pengendalian Internal dalam Pemberian Kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut

Sintiawati Nurfaidah¹; Erik Kartiko²

¹ Universitas Garut
24021119042@fekon.uniga.ac.id

² Universitas Garut
erikkartiko@uniga.ac.id

Abstrak

Pengendalian internal adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan telah mencapai tujuan dan sarannya. Pengendalian internal kredit merupakan suatu perencanaan organisasi dan semua tindakan terkait dengan yang diterapkan oleh suatu entitas atau perusahaan guna menjaga aktiva dan mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengendalian internal dalam pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak koperasi dan data sekunder berupa profil perusahaan, struktur organisasi dan dokumen lainnya yang terkait dengan kredit. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal dalam pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut dapat dikatakan baik namun masih belum memadai karena masih ada beberapa indikator pengendalian internal yang belum terpenuhi.

Kata kunci: Pengendalian Internal, Pengendalian Kredit.

Abstract

Internal controls are policies and procedures designed to provide management with reasonable assurance that the company is achieving its goals and objectives. Credit internal control is an organizational plan and all actions related to those implemented by an entity or company to protect assets and encourage employees to follow company policies. So this study aims to find out how internal control is in granting credit at the Daarut Tauhid Community Empowerment Cooperative, Garut Branch. The method in this study uses qualitative methods. The data sources used are primary data in the form of data from interviews conducted with cooperatives and secondary data in the form of company profiles, organizational structures and other documents related to credit. Data collection techniques using library research and interviews. Based on the results of the study, internal control in granting credit at the Daarut Tauhid Community Empowerment Cooperative Garut Branch can be said to be good but still inadequate because there are still several indicators of internal control that have not been fulfilled.

Keywords: *Internal Control, Credit Control.*

1 Pendahuluan

Organisasi ekonomi atau unit usaha berbadan hukum salah satunya adalah koperasi. Kerena perannya dalam badan usaha, koperasi perlu untuk selalu ditunjukan berpartisipasi dalam memberdayakan anggotanya serta membantu perekonomiannya supaya dapat menanggulangi kesenjangan perekonomian dan sosial, maka koperasi mampu memenuhi perannya sebagai wadah bagi anggotanya dalam perekonomian rakyat. Usaha rakyat yang perlu dikembangkan dan memperoleh perhatian salah satunya yaitu badan usaha kecil dan menengah. Para pengusaha harus bisa melakukan suatu hal untuk meningkatkan usahanya. Namun umumnya yang menghambat adalah masalah modal. Maka koperasi berperan membantu masalah tersebut dengan pemberian kredit.

Dalam melakukan aktivitas pemberian kredit tersebut koperasi perlu melakukan pengelolaan dan pengawasan yang memadai serta terkendali demi menghindari masalah dan risiko dari pemberian kredit. Umumnya koperasi melakukan kewajibannya dalam bertanggung jawab atas kelancaran sistem pemberian kredit dengan melakukan pengendalian internal.

Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid atau dikenal dengan KOPMU-DT adalah koperasi yang menjalankan kegiatannya dengan sistem syariah. Pemberian kredit di KOPMU-DT ada tiga macam yaitu mudharabah atau pembiayaan usaha, qardh hasan atau pinjaman berupa uang dan hiwalah atau peralihan hutang. Dalam pemberian kredit tersebut dapat timbul resiko atau masalah, salah satunya anggota yang kurang mematuhi aturan sehingga telat dalam pembayaran.

Pada KOPMU-DT Cabang Garut masih banyak anggota yang kurang taat aturan, terbukti dari data periode September sampai dengan february terdapat 44% dari semua jenis kredit anggota yang dihapuskan karena kelalaian dalam pembayaran sehingga semua anggota tersebut dikeluarkan serta tanggung jawab juga dilimpahkan kepada anggota lain yang satu kelompok untuk tanggung renteng. Dampak dari masalah tersebut adalah berkurangnya jumlah anggota yang semula 962 anggota menjadi 535 anggota dan adanya tanggung renteng oleh anggota kelompok dari wilayah anggota yang tidak bisa bayar tersebut. Karena koperasi adalah badan usaha yang berbasis kekeluargaan apalagi KOPMU-DT adalah koperasi syariah, jadi pengendalian internal dari masalah tersebut kurang tegas karena tidak ada sanksi hukum atas anggota tersebut dan piutangnya dihapuskan kemudian menunggu anggota tersebut mau membayar sampai waktu yang tidak terbatas.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Koperasi

Koperasi umumnya adalah badan usaha berbentuk hukum di mana menjalankan kegiatan dengan sistem kerja sama dan keanggotaan. Menurut Tambunan & Tambunan (2019) koperasi diambil dari bahasa latin, yaitu "*Coorpere*" dan selanjutnya disajikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi "*Cooperation*", kata "*Co*" berarti bersama dan "*Operation*" artinya bekerja. Maka kata *corporation* berarti bekerja secara bersama-sama dalam artian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama.

Berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012, koperasi yaitu badan atau unit usaha dimana memiliki anggota orang atau badan hukum yang kegiatannya didasarkan prinsip-prinsip koperasi dan juga merupakan kegiatan perekonomian masyarakat dengan dasar asas kekeluargaan (Tambunan & Tambunan, 2019). Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi adalah badan usaha hukum beranggotakan beberapa orang yang bekerja sama dalam gerakan ekonomi masyarakat.

2.2 Pengendalian Internal

Hery (2019) mengemukakan bahwa pengendalian internal adalah prosedur serta kebijakan yang dibuat demi menyerahkan suatu kepastian yang layak kepada manajemen bahwa suatu entitas sudah memenuhi tujuan beserta sasarannya. Sedangkan definisi pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yaitu suatu tahapan dimana bisa mempengaruhi direksi, manajemen, serta pegawai terhadap penyediaan dengan benar atas kepastian terhadap prestasi digapai dengan objektif pada penerapan mengenai pelaporan finansial yang bisa dipercaya, penerapannya efisien serta efektif terhadap aktivitas operasi suatu entitas, juga penerapan aturan beserta hukum berlaku supaya dipatuhi berbagai pihak.

2.3 Komponen Pengendalian Internal COSO

Indikator pekerjaan pengendalian internal yang dipergunakan berbagai perusahaan besar di dunia berasal dari *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*. Berikut ini 5 komponen pengendalian COSO (Hery, 2019) :

1. Lingkungan Pengendalian

Komponen ini memiliki fungsi bagaikan penopang untuk komponen-komponen lainnya. lingkungan pengendalian memiliki kegiatan yaitu tindakan, kebijakan serta sistem yang menggambarkan etika manajemen senior, dierkur, dan yang pemegang di seluruh perusahaan terhadap pengendalian internal dan kepentingannya bagi entitas.

Esensi keberhasilannya pengendalian yang efektifitasnya baik terdapat dalam etos manajemen. Jika manajemen senior begitu terfokus pada pengendalian, seluruh anggota yang lain pasti melakukan hal yang sama. Dalam pemahaman dan mengevaluasi lingkungan pengendalian, seorang pemeriksa harus memiliki pertimbangan pada komponen atas lingkungan pengendalian berikut ini:

- a. Integritas dan Nilai-Nilai Etis
- b. Komitmen pada Kompetensi
- c. Partisipasi Dewan Komisaris dan Komite Audit
- d. Struktur Organisasi
- e. Kebijakan perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entias)

2. Penilaian Risiko

Komponen ini adalah kebijakan yang diambil manajemen dalam memverifikasi serta menelaah resiko yang berhubungan dengan pembuatan pelaporan finansial yang memiliki kesesuaian terhadap standar akuntansi. Penilaian risiko oleh manajer beda dari penilaian risiko auditor, meskipun terdapat keterkaitan antara keduanya. Ketika manajemen melakukan penilaian risiko sebagai penerapan pengendalian internal dalam meminimalisir kesalahan.

3. Aktivitas Pengendalian

Hal ini mengenai prosedur serta kebijakan dalam membantu memastikan bahwa tindakan yang dibutuhkan dalam menanggulangi risiko sudah diperoleh untuk mewujudkan sasaran perusahaan. Prosedur serta tindakan tersebut diantaranya:

- a. Pemisahan Tugas

- b. Setiap bagian pekerjaan seharusnya dilakukan oleh karyawan yang berbeda. Pemisahan tugas juga harus diterapkan antara karyawan yang menangani pekerjaan pencatatan aset secara fisik (operasional).
 - c. Transaksi diotorisasi dengan tepat
 - d. Kelengkapan catatan serta dokumen
 - e. Catatan dan kondisi fisik aset dikendalikan dengan baik
 - f. Verifikasi Internal dan pemeriksaan yang independen
4. Informasi dan Komunikasi Akuntansi
- Informasi serta komunikasi akuntansi bertujuan supaya transaksi yang dicatat, diolah serta dilaporkan sudah mencakup enam tujuan dan sasaran audit umum terhadap transaksi, diantaranya:
- a. Transaksi yang dicatat benar adanya
 - b. Transaksi yang ada telah dicatat
 - c. Transaksi yang dicatat sesuai dengan nominal sesungguhnya
 - d. Transaksi yang dicatat di posting serta diikhtisarkan secara benar
 - e. Transaksi dikelompokkan dengan sesuai
 - f. Tanggal transaksi dicatat dengan benar
5. Pemantauan
- Suatu proses penilaian sepanjang waktu atas kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika dianggap perlu, metode utama untuk mengawasi kinerja mencakup:
- a. Supervisi yang efektif
 - b. Akuntansi pertanggungjawaban
 - c. Audit intern

3 Metode Penelitian

Sugiyono (2017) menyatakan bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2017).

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian mengenai pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut ini diuraikan berdasarkan komponen pengendalian internal menurut *Committee of Sponsoring Organization (COSO)*. Komponen tersebut antara lain:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Aktivitas pengendalian
4. Informasi dan komunikasi akuntansi
5. Pemantauan

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian internal pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut dapat diuraikan berdasarkan beberapa faktor berikut ini:

1. Integritas dan Nilai-Nilai Etis

Sub komponen pertama dari lingkungan pengendalian adalah integritas dan nilai-nilai etis. Suatu perusahaan harus mempunyai integritas dan nilai etis yang baik supaya lingkungan pengendalian yang efektif. Berdasarkan hasil penelitian, KOPMU-DT Cabang Garut telah menetapkan beberapa standar perilaku dan nilai-nilai etis yang diantaranya Khadimul Ummah, Optimis, Profesional, dan Ukhuwah

2. Komitmen Pada Kompetensi

Kompetensi yang dimiliki setiap karyawan sangat penting dalam menjalankan operasional perusahaan, maka dari itu perusahaan harus menetapkan standar bagi karyawan yang akan bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, Kopmu Garut telah menetapkan kriteria kompetensi bagi setiap karyawan, diantaranya:

- a) Bisa membaca al-quran.
- b) Minimal pendidikan D3/S1 untuk posisi kepala cabang, *teller* dan admp.
- c) Minimal pendidikan SMA/SMK/Sederajat untuk posisi tenaga pendamping lapangan.
- d) Memiliki kemampuan komputerisasi untuk bagian kepala cabang, *teller* dan admp.

3. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit

Komite audit di sebuah perusahaan sangat penting dalam pengendalian internal. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak koperasi, KOPMU-DT telah memiliki dua komite audit dan partisipasinya dalam kegiatan koperasi diantaranya:

- a) Pengawas dari direktur utama DT Peduli.
- b) Dewan Pengawas Syariah yang memantau teknis dari akad-akad.

4. Struktur Organisasi

Pada struktur organisasi KOPMU-DT di Cabang Garut, ditemukan beberapa kelemahan yaitu masih terdapat perangkapan tugas. Perangkapan tugas tersebut adalah adanya cabang rintisan KOPMU-DT di Cibiuk tetapi pegawai admp dan *teller* nya masih dirangkap dengan admp dan *teller* dari KOPMU-DT Cabang Garut, hanya saja kepala cabang nya berbeda dan tenaga pendamping lapangannya dirangkap oleh kepala cabang rintisan tersebut.

5. Kebijakan Perihal Sumber Daya Manusia (Karyawan Entitas)

Kebijakan perihal SDM di KOPMU-DT Cabang Garut diuraikan sebagai berikut:

a) Mekanisme perekrutan karyawan

Perekrutan karyawan di Kopmu dilakukan di pusat dan nantinya akan ditempatkan di tiap cabang. Perekrutan dilakukan dengan dua jenis yaitu pertama merekrut santri di pondok pesantren Daarut Tauhid yang berpotensi menjadi karyawan Kopmu. Jika masih membutuhkan maka akan dibuka pendaftaran untuk umum dan diterima apabila memenuhi kriteria dan lulus tahap wawancara. Karyawan yang baru diterima akan melakukan proses pelatihan dan magang terlebih dahulu untuk melihat perkembangan kinerjanya, jika menunjukkan peningkatan pekerjaan dan produktif dalam pekerjaannya maka bisa diperpanjang kontrak.

b) Pelatihan karyawan

Pelatihan karyawan juga dilaksanakan oleh KOPMU-DT Pusat dengan peserta pelatihan adalah karyawan dari tiap cabang dalam jangka waktu *fleksibel*, artinya tergantung pada keputusan dari pusat. Berdasarkan hasil wawancara, pelatihan dilakukan tidak rutin tiap tahun tetapi jika banyak karyawan baru.

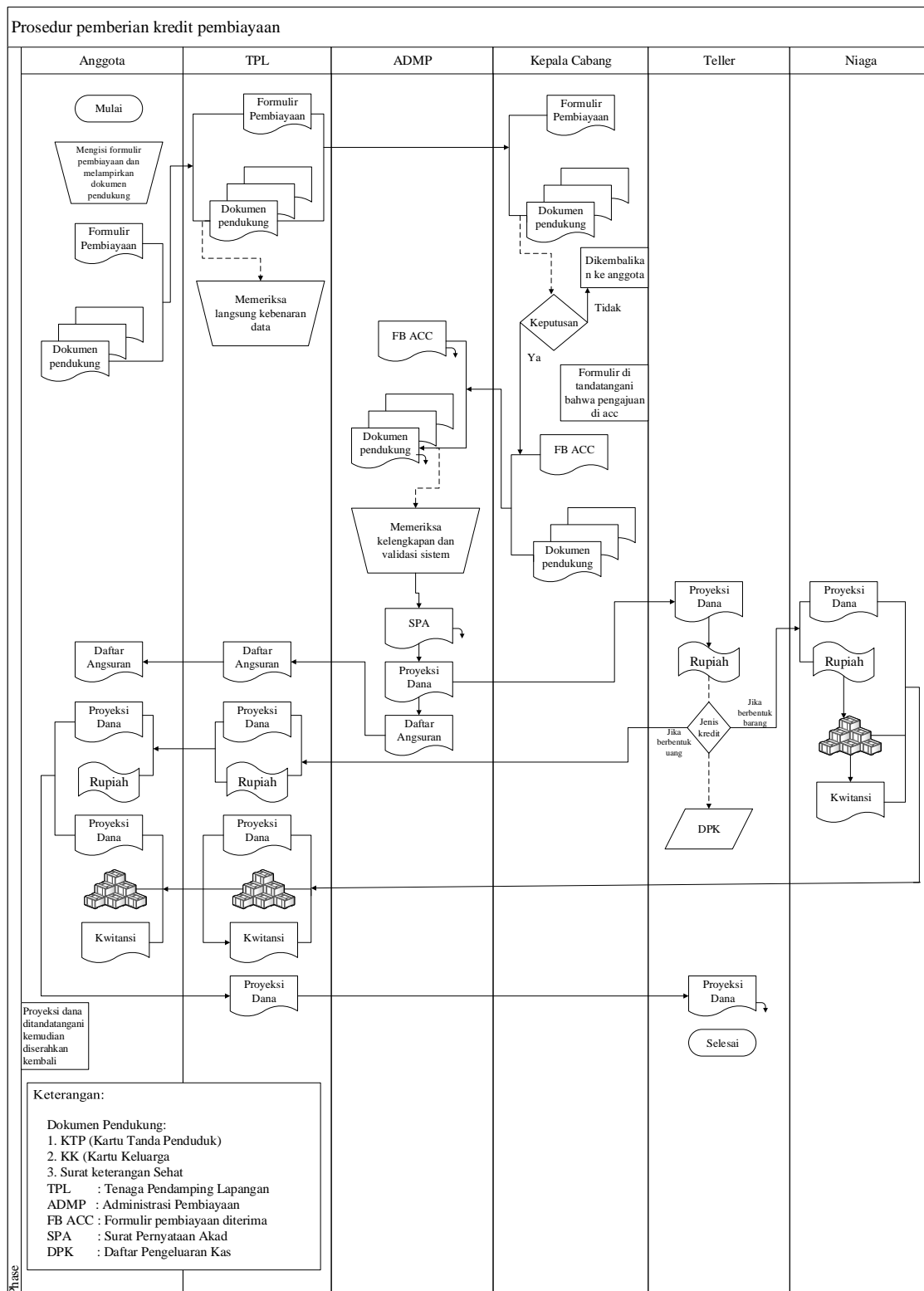
c) Kebijakan atas karyawan melanggar aturan

Berdasarkan hasil wawancara, KOPMU-DT Cabang Garut telah menetapkan kebijakan yang tegas atas tindakan yang melanggar aturan diantaranya jika menghilangkan dana anggota dengan jumlah yang besar maka akan dikeluarkan karena sudah khianat, tapi jika menghilangkan dibawah Rp100.000 misal barang-barang atau peralatan kopmu maka hanya akan diberi teguran dan mengganti kehilangannya. Begitu juga jika kesalahannya berupa kelalaian atau kesianggan, itu masih dicoba untuk diperingati.

Penilaian Risiko

1. Proses Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit pasti akan ada risiko yang mungkin terjadi, berikut ini proses pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut:



Gambar 1: Prosedur pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut

Dengan narasi sebagai berikut:

- a) Pemohon atau anggota melakukan pengajuan permohonan pembiayaan kepada TPL dan mengisi sendiri formulir permohonan pembiayaan tersebut serta pengumpulan dokumen pendukung yang diperlukan yaitu KK, KTP dan Surat keterangan sehat kepada TPL.
- b) Setelah itu TPL melakukan validasi langsung kepada pemohon yaitu dengan menanyakan kebenaran data sesuai dengan yang tertera di formulir pengajuan pembiayaan. Selanjutnya membawa formulir pengajuan ke kantor dan langsung menyerahkannya ke Kepala Cabang.
- c) Berkas pengajuan pembiayaan di kumpulkan dan kepala cabang melakukan rapat komite dengan 2 orang TPL untuk sebagai saksi dan juga sebagai pendukung dari Pemohon.
- d) Setelah melakukan rapat komite antara KACAB dan TPL maka akan menghasilkan keputusan apakah pengajuan pembiayaan tersebut dapat diterima atau tidak.
- e) Jika pengajuan pembiayaan ditolak maka berkas tersebut dikembalikan ke TPL dan TPL akan memberitahu kepada Pemohon bahwa pengajuannya ditolak dan untuk formulir pengajuannya yang diterima maka formulir pengajuan diberikan ke bagian ADMP.
- f) ADMP menerima berkas pengajuan pembiayaan yang disetujui kemudian melakukan validasi sistem dan selanjutnya membuat surat pernyataan akad, proyeksi dana dan daftar angsuran. Proyeksi dana diberikan kepada *teller* untuk proses pencairan uang, surat pernyataan akad diarsipkan oleh admp dan daftar angsuran diberikan kepada TPL untuk nanti diserahkan kepada anggota.
- g) Setelah menerima proyeksi dana maka *teller* akan melakukan pembukuan untuk memproses pencairan dana. Jika jenis kreditnya berupa uang, maka proyeksi dana beserta uang langsung diberikan kepada TPL lalu diserahkan kepada anggota. Jika jenis kreditnya berupa barang, maka proyeksi dana beserta uang untuk pembiayaan akan diberikan kepada niaga untuk pengadaan produk pembiayaan yang dibutuhkan anggota.
- h) Bagian niaga menyediakan produk sesuai proyeksi dana dan membuat kwitansi. proyeksi dana, produk beserta kwitansi diberikan kepada TPL untuk selanjutnya diberikan kepada anggota.
- i) Proyeksi dana ditandatangani oleh anggota pemohon kemudian dikembalikan lagi kepada TPL untuk kemudian diberikan ke *teller* dan diarsipkan.
- j) Angsuran dilakukan setiap satu minggu sekali oleh TPL.

Berdasarkan prosedur pemberian kredit di atas, terdapat beberapa kelemahan yaitu kurangnya pengendalian internal sebelum diberikannya kredit. Pada saat setelah menerima pengajuan kredit pembiayaan, TPL hanya memeriksa kebenaran data dengan menanyakan langsung kepada anggota pada saat pertemuan, tidak ada survey langsung ke rumah anggota untuk melihat apakah benar usaha itu dijalankan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara, survey dilakukan pada saat pendaftaran menjadi anggota, tetapi survey dilakukan dengan cara mengunjungi rumah dan memeriksa apakah benar anggota tersebut termasuk kurang mampu dan memerlukan modal untuk membuka usaha karena tujuan koperasi ini adalah untuk membantu umat meningkatkan perekonomian.

Maka dari itu, resiko yang paling sering terjadi dalam pemberian kredit tersebut adalah keterlambatan anggota dalam membayar angsuran pinjaman. Jumlah kredit yang dihapuskan paling banyak pada saat krisis ekonomi akibat pandemi beberapa waktu lalu. Karena kurangnya pengendalian sebelumnya, maka pihak koperasi melakukan pengendalian sesudah risiko terjadi, pengendalian yang dilakukan KOPMU-DT Cabang Garut dalam mengatasi resiko tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mencoba mengunjungi rumah anggota tersebut dan dibicarakan secara baik-baik.
- b. Melakukan sistem tanggung renteng oleh anggota-anggota yang satu wilayah dengannya pada pertemuan dimana anggota tersebut tidak bisa bayar angsuran, tujuannya agar mereka bisa saling membantu dan mengingatkan.

- c. Jika sampai tenggat waktu angsuran belum lunas, pihak koperasi tetap mencoba menghubungi dan menagih kewajiban anggota tersebut dan mengeluarkan surat teguran.

Namun jika sudah dilakukan upaya-upaya tersebut tetapi sampai beberapa bulan dari tenggat waktu angsuran belum lunas, maka anggota tersebut dikeluarkan dari koperasi dan simpanan wajib beserta tabungannya (jika ada) dibayarkan pada tunggakannya, jika masih belum cukup maka diambil dari dana cadangan kerugian piutang. Meskipun sudah dikeluarkan dan kewajibannya dihapuskan, anggota tersebut masih harus membayar sisa hutangnya kapan pun anggota tersebut bisa membayar.

2. Sistem Informasi Pemberian Kredit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, demi menghindari hal yang tidak diinginkan pihak KOPMU-DT Cabang Garut menerapkan sistem informasi pemberian kredit dengan menggunakan aplikasi syirkah yaitu aplikasi operasional khusus KOPMU-DT. Pihak administrasi pembiayaan membuat daftar register yang berisi rekapan daftar nama-nama anggota yang melakukan pinjaman beserta kumpulan tabel angsuran yang nantinya akan terakses juga oleh kepala cabang. Begitu juga *teller* yang membuat buku kasir berisi catatan jumlah realisasi kredit setiap bulannya selama periode tertentu.

Aktivitas Pengendalian

Hasil penelitian dan pembahasan atas aktivitas pengendalian akan diuraikan berdasarkan aspek-aspek berikut ini:

1. Pemisahan Tugas

Berdasarkan hasil penelitian, semua bagian pegawai dalam struktur organisasi dalam gambar 1 melakukan tugas-tugas dalam pemberian kredit diantaranya:

a) Tim Pendamping Lapangan (TPL)

Bagian ini bertugas sebagai langkah awal pemberian kredit yaitu merekrut dan melayani anggota, menerima permohonan kredit pembiayaan serta melakukan penagihan setiap minggunya sampai anggota melunasi pinjamannya atau melanjutkan permohonan kredit selanjutnya. Dalam bagian ini fokus pada kegiatan pinjaman.

b) Bagian Administrasi Pembiayaan (ADMP)

Bagian ini bertanggungjawab atas kebenaran data-data anggota dan menyiapkan serta mengarsipkan dokumen-dokumen terkait kredit pembiayaan. Namun selain itu, bagian ini juga menangani dokumen-dokumen koperasi lainnya.

c) Bagian Niaga

Bagian ini bertugas menyiapkan kebutuhan-kebutuhan produk dalam kredit pembiayaan.

d) *Teller*

Bagian ini bertanggungjawab atas pencatatan transaksi dan pembukuan atas keluar masuknya kas dalam pemberian kredit dan operasional lainnya. Namun selain itu, *teller* juga bertanggungjawab atas pengadaan kebutuhan bulanan koperasi.

e) Kepala Cabang

Kepala cabang hanya memantau dan memberikan keputusan atas suatu masalah dalam kegiatan kredit tersebut.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat dilihat bahwa penerapan pemisahan tugas dalam pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut sudah baik, pemisahan tugas antara pencatat aset dengan yang menangani aset secara langsung juga dilakukan dengan baik oleh *teller* dan TPL. Namun karena koperasi ini adalah koperasi cabang, bagian-bagian atau karyawan-karyawan tersebut tidak hanya menangani pemberian kredit tetapi juga pekerjaan lain. Contohnya seperti

teller yang juga menyiapkan kebutuhan bulanan kopmu seperti perlengkapan, konsumsi dan lain-lain.

2. Otorisasi yang Tepat atas Transaksi

Setiap transaksi tentunya harus ada otorisasi yang tepat atau persetujuan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan hasil wawancara, setiap transaksi kredit yang diajukan oleh anggota harus melalui tahap pemeriksaan terlebih dahulu yaitu pemeriksaan oleh TPL, keabsahan dokumen oleh bagian ADMP dan atas persetujuan kepala cabang.

3. Dokumen dan Catatan yang Memadai

Proses pemberian pembiayaan pada Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut menggunakan dokumen tertulis atau bukti tertulis diantaranya:

- a) Formulir Permohonan Pembiayaan
- b) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c) Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- d) Surat Keterangan Sehat
- e) Proyeksi dana, merupakan dokumen yang berisi perincian jumlah pembiayaan dan tanggal pencairan beserta akad yang disepakati.
- f) Surat Pernyataan Akad
- g) Tabel Angsuran
- h) Kwitansi/Nota Realisasi

Sedangkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi pemberian kredit pada Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut adalah sebagai berikut:

- a) Jurnal Umum, merupakan hasil output atas semua transaksi kas yang sebelumnya telah diinput kedalam komputer.
- b) Daftar Penerimaan Kas, merupakan rekap atas semua transaksi penerimaan kas.
- c) Daftar Pengeluaran Kas, merupakan rekap atas semua transaksi pengeluaran kas
- d) Daftar Register, yaitu rekap yang berisi daftar nama-nama debitur yang meminjam uang atau kumpulan tabel angsuran.
- e) Buku Kasir, yaitu buku yang berisi catatan jumlah realisasi kredit setiap bulannya selama periode tertentu.

4. Pengendalian atas Aset dan Catatan

Berdasarkan hasil wawancara, berikut ini pengendalian atas aset dan catatan di KOPMU-DT Cabang Garut:

- a) Aset berupa kas yang dimiliki oleh koperasi disimpan di Bank tetapi untuk uang dalam jumlah kecil atau kas kecil dipegang oleh teller di laci meja teller karena belum memiliki brankas. Sedangkan untuk surat-surat berharga dan catatan lainnya disimpan di arsip.
- b) Untuk aset tetap berwujud seperti komputer disimpan di kantor dan dikunci setiap jam kerja berakhir.

Informasi dan Komunikasi Akuntansi

Hasil penelitian dan pembahasan atas Informasi dan Komunikasi Akuntansi di KOPMU-DT Cabang Garut akan diuraikan berdasarkan aspek-aspek berikut ini:

1. Komunikasi Antara Pegawai dan Anggota

Karyawan khususnya pendamping lapangan mengkomunikasikan sistem untuk pinjaman dengan memberikan dokumen-dokumen berikut:

- a) Memberikan buku pegangan bagi setiap anggota berisi materi dampingan mengenai KOPMU-DT.

- b) Adanya proyeksi dana berisi rincian jumlah pembiayaan, tanggal pencairan, jadwal angsuran beserta akad yang disepakati.
- c) Adanya dokumen tabel angsuran yang dipegang oleh anggota yang mengajukan pinjaman dan ditandai setiap membayar angsuran sehingga anggota tersebut mengetahui sisa angsurannya.

2. Standar Operasional Perusahaan

Berdasarkan hasil wawancara, KOPMU-DT sudah memiliki standar operasional perusahaan (SOP) yang tertulis bagi semua karyawan yang dibuat oleh pusat dan diterapkan di semua cabang. SOP mengenai pemberian kredit diantaranya SOP Dampungan dan SOP Form setoran.

3. Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara, proses pengambilan keputusan terkait pemberian kredit adalah konsultasi dari tim pendamping lapangan kepada kepala cabang kemudian kepala cabang akan melakukan kontrol ke lapangan dan akan diambil keputusan atas masalah yang diutarakan oleh pendamping lapangan. Jika masalahnya serius seperti penghapusan piutang, kepala cabang melaporkan terlebih dahulu kepada manajer di pusat untuk menyetujui keputusan tersebut.

Pemantauan

Adapun pemantauan terkait pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut dapat diuraikan berdasarkan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Penilaian Kinerja

Berdasarkan hasil wawancara, penilaian kinerja untuk pegawai KOPMU-DT Cabang Garut dilihat berdasarkan sikap, kedisiplinan dan pemenuhan tugas. Sedangkan penilaian kinerja untuk pemberian kredit dilakukan pada tenaga pendamping lapangan yaitu dengan menilai komunikasi dalam proses penagihan apakah sudah dilakukan dengan baik serta penilaian pencapaian atau realisasi kredit. Jika ada karyawan yang melanggar aturan ataupun kurang dalam dampungan maka akan diberikan SP (Surat Peringatan). Namun tidak ada penghargaan bagi karyawan yang mencapai kinerja yang sesuai dengan kriteria.

2. Evaluasi

Setiap perusahaan pasti melakukan evaluasi dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil wawancara, KOPMU-DT Cabang Garut melakukan evaluasi satu minggu sekali dengan berbagai pembahasan, adapun pembahasan mengenai pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan standar operasional perusahaan yaitu SOP Dampungan dan SOP Form setoran.
- 2) Evaluasi realisasi angsuran kredit dalam pertemuan mingguan.

3. Audit Intern

Berdasarkan hasil wawancara, KOPMU-DT pusat mempunyai audit internal yang memantau semua cabang, tetapi untuk audit internal di cabang itu sendiri dilakukan langsung oleh kepala cabang. Audit intern dilakukan oleh kepala cabang dengan mengaudit laporan keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran atas pemberian kredit serta mengaudit daftar register dan buku kasir.

5 Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis pengendalian internal pemberian kredit di Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid (KOPMU-DT) Cabang Garut, maka dapat menarik kesimpulan bahwa penerapan pengendalian internal pemberian kredit di KOPMU-DT Cabang Garut masih terdapat beberapa kekurangan. Adapun hasil penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Pengendalian, penerapan pengendalian internal atas komponen lingkungan pengendalian sudah dilakukan dengan baik, namun terdapat kekurangan yaitu adanya rangkap jabatan pegawai di KOPMU-DT Cabang Garut dengan KOPMU-DT Rintisan Cibiuk.
- 2) Penilaian risiko, penerapan pengendalian internal atas komponen penilaian risiko sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada kekurangan dalam proses pemberian kredit yaitu kurangnya pengendalian internal pada saat sebelum diberikannya kredit seperti survey usaha anggota terlebih dahulu ataupun surat perjanjian hukum di atas materai.
- 3) Aktivitas Pengendalian, penerapan pengendalian internal atas komponen aktivitas pengendalian sudah dilakukan dengan baik, namun masih ada beberapa kekurangan diantaranya: sudah ada pemisahan tugas dalam proses pemberian kredit tetapi ada bagian *teller* dan admp merangkap tugas dengan tugas koperasi lainnya selain pemberian kredit kemudian belum ada brankas tempat penyimpanan aset.
- 4) Informasi dan Komunikasi Akuntansi, penerapan pengendalian internal atas semua komponen informasi dan komunikasi akuntansi sudah dilakukan dengan baik diantaranya: pegawai telah mengkomunikasikan dokumen-dokumen mengenai pemberian kredit kepada anggota, sistem informasi akuntansi sudah menggunakan komputer yaitu *Microsoft excel* dan aplikasi khusus yaitu syirkah, sudah memiliki standar operasional (SOP) pemberian kredit yaitu SOP Dampungan dan SOP Form Setoran dan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah.
- 5) Pemantauan, penerapan pengendalian internal atas komponen pemantauan yang sudah dilakukan dengan baik yaitu evaluasi terkait pemberian kredit dilakukan satu minggu sekali. Namun masih ada beberapa kekurangan diantaranya: tidak ada penghargaan atas penilaian kinerja karyawan, belum ada karyawan khusus untuk audit intern.

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran-saran yang bisa diberikan kepada Koperasi Pemberdayaan Ummat Daarut Tauhid Cabang Garut dalam pengendalian internal pemberian kredit diantaranya:

- 1) Sebaiknya koperasi segera merekrut pegawai untuk KOPMU-DT rintisan Cibiuk agar tidak ada perangkap jabatan dan bisa fokus pada kegiatan di satu cabang.
- 2) Sebaiknya TPL melakukan survey terlebih dahulu sebelum keputusan pemberian kredit dengan cara memeriksa apakah usaha tersebut benar-benar dijalankan dengan baik.
- 3) Sebaiknya diadakan surat perjanjian yang menyatakan bahwa anggota sebagai pemohon dalam pemberian kredit akan melunasi pinjamannya dengan tepat waktu yang ditandatangani di atas materai demi menghindari kredit macet.
- 4) Sebaiknya untuk pengadaan kebutuhan-kebutuhan koperasi tidak dilakukan oleh *teller* supaya *teller* lebih fokus pada aktivitas keuangan.
- 5) Sebaiknya ada penghargaan bagi karyawan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan mencapai dapat mencapai target dalam pekerjaannya agar dapat memotivasi karyawan tersebut dan karyawan lainnya.
- 6) Sebaiknya koperasi merekrut karyawan untuk bagian pekerjaan audit internal yang berkantor di kantor pusat agar tidak dilakukan oleh kepala cabang.

Daftar Pustaka

- Agoes, S. (2018). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitria. (2012). Analisis Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan to Deposit Ratio Pada Pt. Bank Indonesia (Persero). *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 88.

- Hery. (2019). *AUDITING Dasar Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: PT Grasindo.
- Kasmir. (2011). *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- KOPMU-DT, D. P. (2018). Materi Dampingan Koperasi Pemberdayaan Ummat. *KOPMU-DT*, 1.
- Moonti, U. (2016). *Bahan ajar Mata Kuliah Dasar-Dasar Koperasi* (1nd ed.). (Y. Tamu, Ed.) Yogyakarta: Interpena.
- Putri. (2015). Dalam Upaya Mendukung Pengendalian Manajemen Kredit (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Tri Aji Mandiri Kota Kediri). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1-9.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, D. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tambunan, T. S., & Tambunan, H. (2019). *Manajemen Koperasi*. Bandung: Penerbit Yrama Widya.